

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan perbankan dalam suatu negara sangat penting, yaitu sebagai *agent of development* atau agen pembangunan. Ini dikarenakan fungsi utama perbankan yaitu menghimpun dana pihak ketiga dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Perbankan nasional sangat erat kaitannya dengan pengendalian modal dalam sektor-sektor produktif. Keberadaan perbankan sangat dibutuhkan sebagai penengah atau perantara pihak yang kelebihan dan kekurangan dana. Sebagai *agent of development* atau agen pembangunan perbankan memiliki peran yang signifikan dalam mensejahterakan masyarakat dan perekonomian di suatu negara. Dalam negara Indonesia perbankan dibedakan menjadi dua yaitu : perbankan konvensional dan perbankan syariah.

Perbankan konvensional melakukan tugasnya sesuai peraturan pemerintah. Berbeda dengan perbankan syariah yang menjalankan tugasnya sesuai dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah Pada Bab 1 Pasal 1 Ayat 7 disebutkan bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah. Dengan adanya peraturan perbankan syariah diharapkan mampu menerapkan perbankan dengan prinsip-prinsip syariah. Sebagai undang-undang yang mengatur perbankan syariah sangat jelas melarang adanya unsur *riba*, *maisir*, *gharar*, *haram*, dan *zalim*.

Pada dasarnya kegiatan utama perbankan syariah yaitu melakukan penyaluran dana pihak ketiga dalam pembiayaan. Pembiayaan sendiri dalam hukum Islam banyak jenisnya mulai dari jual-beli, kerja

samamaupun sewa. Fungsi pengawasan dalam pembiayaan yang telah disalurkan oleh pihak perbankan atau lebih dikenal dengan nama *shohibul kmaal* kepada pihak ketiga sebagai *mudhorib* sangatlah penting. Dalam penyaluran pembiayaan perbankan syariah harus mempertimbangkan kegunaan, karena dalam perbankan syariah turut serta Dewan Pengawas Syariah sebagai pengawas yang wajib ada di setiap perbankan syariah. Selain sebagai sumber penghasilan utama dari sektor perbankan pembiayaan juga harus dijaga setaip kelancarannya. Pengawasan terhadap *mudhorib* sangatlah penting. Kelancaran dan kepatuhan *mudhorib* dalam melakukan pembayaran juga merupakan suatu yang bisa mejadi bahan pertimbangan dalam memberikan pembiayaan agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah.

Pembiayaan juga ada yang bermasalah dan memerlukan penanganan. Penanganan pembiayaan yang bermasalah harus sesuai standart operasional. Pembiayaan bermasalah disebabkan banyak faktor yang menjadi alasan terjadinya pembiayaan bermasalah faktor tersebut adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam perbankan itu sendiri seperti kegagalan AO dalam menganalisis calon nasabah pembiayaan. Faktor eksternal yaitu faktor yang dipengaruhi oleh lingkungan dan kegagalan usaha dari nasabah pembiayaan. Hal yang seperti itu memerlukan penanganan yang tepat agar pemabayaran dapat kembali membaik sesuai waktu jatuh tempo. Dalam ajaran Islam penanganan pembiayaan bermasalah harus sesuai dengan syariah Islam dan tidak merugikan kedua belah pihak. Inilah yang menyebabkan perbedaan perbankan syariah dan konvensional dalam menangani pembiayaan bermasalah.

Dalam penanganan pembiayaan bermasalah sesuai syariat Islam perlu diketahui penyebab gagal bayar serata adanya iktikad baik dari nasabah pembiayaan. Maka akan dilakukan penanganan pembiayaan bermasalah mulai dari dari *resceduling*, *restucturing*, dan *reconditioning*

dengan mempertimbangkan asas gotong royong. Apabila cara itu dirasa kurang berhasil maka pihak perbankan akan melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara melalui lembaga hukum selanjutnya akan diadakan lelang terhadap jaminan. Sebagai langkah terakhir maka pihak perbankan akan menghapus bukukan aset-aset yang tidak produktif lagi.

Seperti perbankan umumnya BPRS Bumi Rinjani Batu juga melakukan fungsi pengawasan kepada setiap *mudhorib*. Pengawasan yang dilakukan mulai dari pencairan dana pembiayaan, samapi selesai berakhirnya masa pembiayaan. Tetapi masih ada saja ditemukan *mudhorib* yang melakukan penunggakan pembayaran yang disebabkan banyak faktor, mulai dari faktor internal maupun eksternal. Untuk menangani hal yang seperti ini diperlukan strategi dan prosedur penanganan yang tepat agar tidak merugikan salah satu pihak BPRS Bumi Rinjani Batu maupun *mudhorib*. Itulah yang menjadi dasar untuk dijadikan penelitian terhadap Prosedur Penanganan Pembiayaan Bermasalah Sesuai Dengan Syariat Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ditulis di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah
2. Prosedur penanganan pembiayaan bermasalah sesuai ketentuan syariat Islam

C. Tujuan Dan Mafaat Pembahasan

Berdasarkan rumusan masalah yang di ajukan, maka tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Untuk menegetahui faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah
2. Untuk mengetahui prosedur penanganan pembiayaan bermasalah sesuai ketentuan syariat Islam

D. Batasan Masalah

Pembatasan masalah pada pembahasan mengenai penyebab pembiayaan bermasalah sesuai dengan syariat islam pada BPRS Bumi Rinjani Batu. Adapaun pembahasa yang seperlunya akan dibahas mengenai cara pengendalian pembiayaan bermasalah serta faktor-faktor yang penyebabnya pembiayaan bermasalah pada pihak nasabah pembiayaan.

E. Manfaat

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian diatas sebagai berikut:

1. Bagi pihak BPRS Bumi Rinjani Batu untuk memberikan pengetahuan mengenai cara penanganan pembiayaan yang bermasalah beserta faktor yang mempengaruhinya
2. Bagi peneliti selanjutnya semoga penelitian ini bisa diteliti lebih lanjut, apabila dilanjutkan di tempat yang sama
3. Bagi pembaca dapat memberikan mafaat untuk memperoleh ilmu setelah membaca penelitan ini.